

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis untuk menjawab rumusan masalah yang ada terkait dengan upaya apa saja yang dilakukan oleh UMKM Lokal yang berada di Provinsi Riau dalam mengikuti *e-procurement* pada tahun 2011-2015 yaitu telah di paparkan pada bab sebelumnya terkait dengan temuan dan analisis. Adapun kesimpulan dari rumusan masalah tersebut adalah dalam paket lelang melalui *e-procurement* ini, nilai pekerjaan bagi UMKM yang disediakan oleh LPSE Provinsi Riau yaitu nilai pekerjaan dari Rp. 50 juta – Rp. 100 Milyar, baik dalam penyedia barang/jasa tersebut berasal dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar, yang nantinya hal ini akan menguntungkan pelaku usaha dengan mengikuti *e-procurement*. Dibawah nilai pekerjaan kurang dari Rp. 50 juta akan mengikuti pelelangan secara konvensional (Raja, 2016).

Penggunaan teknologi informasi dengan adanya aplikasi dari LPSE ini memberikan dampak baik bagi kemajuan dan daya saing UMKM di Provinsi Riau dengan menekankan pada efisiensi serta efektifitas dalam penggunaannya sistem elektronik tersebut menjadi cukup baik, yang akan menghindari dari kecurangan-kecurangan yang bisa terjadi dilapangan. Misalnya, adanya unsur lobbying, kecurangan dalam data dan manipulasi yang bisa saja terjadi, agar hal ini akan memberi keadilan bagi seluruh peserta lelang baik peserta dari penyedia

barang/jasa dengan kualifikasi kecil atau besar. Maka hasil kesimpulan dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Pada pengaruh biaya ini di tahun 2010 ditemui masalah dalam aspek biaya bahwa pelaku usaha masih kesulitan dalam mendapatkan KUR pada tahun 2010 sebelum dikeluarkannya Inpres Nomor: 3/2010 untuk peningkatan peran pemerintah daerah dalam rangka perluasan penyaluran KUR. Dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah provinsi membuat kebijakan untuk bekerjasama dengan bank dalam pemberian KUR. Maka pemerintah Provinsi melakukan adanya pengoptimalisasian penyaluran KUR di Provinsi Riau pada tahun 2012. Ditahun 2012 penyaluran KUR ini tidak terlepas dari dukungan bank pelaksana KUR yang telah ditunjuk pemerintah diantaranya yaitu Bank Riau, Bank Nagari, BNI, BRI, Mandiri, BTN, Bukopin, BSM dan BNI Syariah (Rustam, 2012). Produk KUR ini yang telah menjadi solusi finansial yang tepat dan mengena bagi keterbatasan UMKM dalam mengakses Kredit dari perbankan di Riau.
2. Lalu masalah yang ditemui LPSE Provinsi Riau yang kedua adalah melihat adanya kesulitan dari pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini dalam memasarkan harga barang yang mereka miliki, oleh sebab itu LPSE Provinsi Riau dengan mempertimbangkan hal tersebut, merilis *e-catalog* agar mempermudah pelaku usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini agar harga jual yang

mereka miliki masuk dalam sistem *e-catalog* sehingga perusahaan lokal tidak kesulitan untuk mendaftarkan pada LKPP di Jakarta.

3. UMKM ini terbantu oleh adanya asosiasi UMKM yang telah menyediakan wadah klinik UMKM untuk dapat berkonsultasi dan berbagi pengetahuan pada masing-masing UMKM, tetapi juga dapat melihat pengaruh dan keterlibatan UMKM ini terhadap penggunaan *e-procurement* yang juga bukan hanya dibidang pangan dan perdagangan saja, tetapi dalam pengadaan barang dan jasa yang disediakan oleh LPSE pun, UMKM dapat terlibat didalam pekerjaan tersebut.
4. Dengan adanya kejadian seperti itu, pemerintah provinsi berkeinginan untuk dapat memfasilitasi UMKM agar tetap dapat mandiri dan berdaya saing (Mustofa, 2016). Tentunya juga ini akan memudahkan keterlibatan beberapa instansi yang menggunakan jasa maupun layanan dari UMKM di Provinsi Riau (Rustam, 2012). Diketahui bahwa salah satu kesulitan UMKM yaitu pada kemampuan UMKM untuk menyediakan agunan. Padahal jika dilihat sisi strategisnya, peran UMKM ini dalam membantu perekonomian daerah sangat besar, karena dapat menyerap banyak tenaga kerja. Bentuk ini merupakan salah satu upaya pemerintah provinsi Riau, dalam meningkatkan peran UMKM pada pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan yang diamanatkan pada Inpres Nomor: 3/2010 tentang

program pembangunan berkeadilan untuk peningkatan peran pemerintah daerah dalam rangka perluasan penyaluran KUR serta pemberdayaan UMKM.

Maka ini akan memunculkan daya saing yang ranahnya akan lebih maju. Dengan adanya hal ini LPSE Provinsi Riau dirasa telah memberikan tempat yang sesuai untuk menunjukkan bahwa adanya dukungan ini pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Provinsi Riau dalam mewujudkan daya saing mereka baik dalam ranah lokal maupun multinasional.

A. Saran

Adapun yang menjadi saran pada penelitian ini adalah :

1. Pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri mereka setiap individunya dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*).
2. Dapat membantu pihak diantaranya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LPSE dan Dinas Koperasi dan UMKM ini memenuhi atau mengupayakan masyarakat lokal yang menjadi pelaku usaha agar dapat berdaya saing baik secara lokal maupun multinasional.
3. Untuk memudahkan LPSE dalam memberikan pekerjaan perlu adanya pengalokasian nilai pekerjaan bagi UMKM maupun Usaha Besar agar adanya pemerataan bagi masyarakat.

